

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya jumlah pemerintahan Kabupaten/Kota di Indonesia menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah pusat, DPR/DPRD maupun masyarakat. Pertanyaan yang mendasar adalah bagaimana penda tersebut dapat menyelenggarakan aktivitas di wilayahnya, terutama bagi pemerintahan daerah yang baru. Penyelenggaraan aktivitas tersebut tentunya terkait erat dengan masalah anggaran pendapatan dan belanja daerahnya. Dengan kata lain, bagaimana suatu pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada, meningkatkan pendapatan daerahnya, dan mengalokasikannya untuk kesejahteraan masyarakat (*Financial Statistics of Regency/Municipality Government 2014-2015*).

Pada pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa *“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”*. Pemerintah daerah bisa menggunakan pasal tersebut untuk melaksanakan otonomi dengan wewenang yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Maksud dari otonomi tersebut yaitu otonomi daerah dimana kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat daerah masing-masing sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dari masyarakat berlandaskan dengan undang-undang yang berlaku.

Pelaksanaan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintah pusat dan daerah, yang dikenal sebagai otonomi daerah dengan azas dan sistem desentralisasi (Qodarrochman, 2010).

Berlakunya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 perihal Pemerintah Daerah serta Undang-undang No. 33 Tahun 2004 perihal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberi kesempatan luas kepada pemerintah daerah guna mengatur sumber daya yang dipunya supaya mampu memberikan hasil yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. Tiap-tiap pemerintah daerah berusaha untuk memajukan perekonomian daerahnya masing-masing termasuk dengan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, manajemen sumber-sumber PAD yang telah ada hendaknya dikembangkan. Disisi lain, pemerintah daerah seharusnya selalu berinovasi dan berkreasi untuk menggali serta mengembangkan potensi dari sumber-sumber PAD yang dipunya. Oleh karena itu, semakin banyaknya sumber-sumber PAD yang dipunya, maka wilayah tersebut akan semakin banyak mempunyai sumber

pemasukan dimana nantinya dapat digunakan untuk pembangunan daerahnya.

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses multidimensial yang meliputi perubahan struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan (institusi) nasional. Pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan (Yuliadi, 2013).

Sektor pariwisata memiliki kontribusi yang menentukan dalam pembangunan daerah, serta sebagai penggerak untuk memajukan pembangunan pada sektor lain dengan berkala. Berhasilnya pengembangan sektor pariwisata artinya akan meningkatkan peranannya pada pendapatan daerah, yang mana pariwisata adalah salah satu komponen dalam peningkatannya (Saleh, 2003).

Semakin besarnya PAD maka wilayah itu akan semakin independen yang ditandai dengan ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat yang akan semakin berkurang. Tetapi faktanya, kebanyakan wilayah tersebut masih dihadapkan pada ketergantungan fiskal yang berupa subsidi dan bantuan dari pemerintah pusat, dikarenakan terbatasnya PAD yang dimilikinya. Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya, salah satunya dapat diukur melalui kinerja/kemampuan keuangan daerah (Halim, 2004).

Salah satu usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah melalui optimalisasi potensi dalam sektor pariwisata. Pendapatan daerah dan industri pariwisata berkaitan serta berjalan melalui jalur PAD dan bagi hasil pajak/bukan pajak. Menurut Tambunan yang dikutip oleh Badrudin (2001), mengemukakan bahwa industri pariwisata sebagai sumber PAD yaitu industri pariwisata kepunyaan masyarakat daerah (*Community Tourism Development* atau CTD). Melalui pengembangan CTD maka pemerintah daerah bisa mendapatkan kesempatan perolehan pajak serta berbagai retribusi resmi berasal dari aktivitas industri pariwisata yang bercirikan multisektoral, mencakup hotel, restoran, usaha wisata, usaha perjalanan wisata, *professional convention organizer*, pendidikan formal dan informal, pelatihan serta transportasi.

Pada dasarnya harapan untuk meningkatkan pengembangan pariwisata di Indonesia berasal dari berbagai aspek, misal menurunnya peranan migas selaku penghasil devisa, dengan demikian pariwisata sebagai industri jasa adalah salah satu potensi yang prospektif serta sebagai cita-cita terwujudnya kesejahteraan masyarakat di waktu yang akan datang, selain itu bisa untuk meningkatkan pemasukan pajak negara. Pariwisata dirasa cukup layak untuk memajukan ekonomi, sehingga mendapatkan prioritas yang relatif tinggi guna menambah pendapatan negara. Ada berbagai aktivitas yang berkaitan dengan industri pariwisata. Itu artinya tidak sedikit industri lain yang bisa didorong oleh industri pariwisata, contohnya kegiatan biro perjalanan, transportasi, perhotelan,

restoran, kesenian dan budaya daerah, kerajinan rakyat, guider, pameran dan olah raga internasional yang diadakan di berbagai wilayah, serta aktivitas yang lain (Badrudin, 2001).

Pariwisata merupakan salah satu jenis industri baru yang dapat menciptakan kemajuan ekonomi yang relatif cepat dalam menyediakan lapangan pekerjaan, standar hidup dan juga menggerakkan bidang-bidang produktif yang lain. Selaku sektor yang multipel, pariwisata pun mencakup industri-industri klasik yang sesungguhnya, contohnya industri kerajinan tangan dan cinderamata. Secara ekonomis, penginapan dan transportasi juga dikatakan sebagai industri (Saleh, 2003).

Secara garis besar, peran pariwisata meliputi tiga aspek, antara lain aspek ekonomis (sumber devisa, pajak-pajak), aspek sosial (menciptakan lapangan pekerjaan), dan aspek kebudayaan (mempromosikan kebudayaan kepada wisatawan asing) (Spillane J. J., 1987). Didalam perekonomian sebuah negara, apabila dibangun dengan terencana dan terintegrasi, maka fungsi sektor pariwisata akan melampaui sektor migas serta industri yang lainnya.

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, disebutkan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan objek dan

daya tarik wisata di Indonesia serta di dalam menjaga potensi pariwisata alam Indonesia sehingga rasa cinta tanah air dan bisa mempererat persahabatan kerjasama antar bangsa.

Berhasilnya pengembangan sektor kepariwisataan itu artinya akan meningkatkan fungsinya dalam pendapatan daerah, dimana pariwisata adalah faktor utama dengan melihat komponen-komponen yang mempengaruhinya, misal jumlah obyek wisata yang ditawarkan, jumlah wisatawan yang berkunjung baik domestik maupun mancanegara, tingkat hunian hotel, dan lain sebagainya.

Sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1950, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang pertama kali dibentuk di Indonesia. Provinsi Jawa Barat terdiri atas 18 kabupaten dan 9 kota. Ibu kotanya adalah Bandung. Berikut adalah daftar kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat:

Tabel 1.1 Daftar 27 Kabupaten/Kota, Pusat Pemerintahan, Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Provinsi Jawa Barat

No.	Kabupaten/Kota	Pusat Pemerintahan	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	Kabupaten Bandung	Soreang	31	10/270
2	Kabupaten Bandung Barat	Ngamprah	16	-/165
3	Kabupaten Bekasi	Cikarang	23	7/180
4	Kabupaten Bogor	Cibinong	40	17/417
5	Kabupaten Ciamis	Ciamis	26	7/258
6	Kabupaten Cianjur	Cianjur	32	6/354
7	Kabupaten Cirebon	Sumber	40	12/412
8	Kabupaten Garut	Tarogong Kidul	42	21/421
9	Kabupaten Indramayu	Indramayu	31	8/309
10	Kabupaten Karawang	Karawang	30	12/297

11	Kabupaten Kuningan	Kuningan	32	15/361
12	Kabupaten Majalengka	Majalengka	26	13/330
13	Kabupaten Pangandaran	Parigi	10	-/93
14	Kabupaten Purwakarta	Purwakarta	17	9/183
15	Kabupaten Subang	Subang	30	8/245
16	Kabupaten Sukabumi	Palabuhan ratu	47	5/381
17	Kabupaten Sumedang	Sumedang	26	7/276
18	Kabupaten Tasikmalaya	Singaparna	39	-/351
19	Kota Bandung	-	30	151/-
20	Kota Banjar	-	4	9/16
21	Kota Bekasi	-	12	56/-
22	Kota Bogor	-	6	68/-
23	Kota Cimahi	-	3	15/-
24	Kota Cirebon	-	5	22/-
25	Kota Depok	-	17	63/-
26	Kota Sukabumi	-	11	33/-
27	Kota Tasikmalaya	-	10	69/-

Sumber: Kementerian Dalam Negeri RI

Setiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat memiliki potensi pariwisata yang cukup baik dan memberikan sumbangan bagi pendapatan daerahnya.

Tabel 1.2 Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2015

Tahun	PAD	PAD Pariwisata
2011	8.502.643.155	7.747.222.617
2012	9.982.917.415	9.206.540.654
2013	12.360.109.870	11.299.800.791
2014	15.038.153.310	13.823.841.807
2015	15.837.707.187	14.690.475.715
Jumlah	61.721.530.937	56.767.881.584

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi, BPS

Dilihat dari tabel 1.2 bahwa pendapatan asli daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat selalu mengalami peningkatan disetiap tahunnya

dengan jumlah sebesar Rp 61.721.530.937, sedangkan sumbangan pendapatan dari sektor pariwisata adalah sebesar Rp 56.767.881.584.

Kemudian jumlah kunjungan wisatawan juga berpengaruh didalam pendapatan daerah sektor pariwisata. Provinsi Jawa Barat juga termasuk salah satu daerah yang menjadi destinasi wisata, baik wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung ke Provinsi Jawa Barat. Berikut adalah tabel jumlah kunjungan wisatawan di wilayah Provinsi Jawa Barat dari tahun 2011-2015.

Tabel 1.3 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2015

Tahun	Wisatawan		Jumlah
	Domestik	Mancanegara	
2011	35.315.020	1.333.512	36.648.532
2012	42.758.063	1.905.378	44.663.441
2013	45.536.179	1.794.401	47.357.580
2014	47.992.088	1.962.639	49.954.727
2015	56.334.706	2.027.629	58.362.335

Sumber:Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke wilayah Provinsi Jawa Barat selalu mengalami peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi pada tahun 2013 mengalami penurunan sebanyak 110.977 jiwa pada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, yang pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2012 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tersebut sebesar 1.905.378 jiwa berkurang menjadi sebesar 1.794.401 jiwa.

Hal yang paling utama dalam membangun sistem ekonomi daerah agar mampu meningkatkan kemandirian daya saing salah satunya adalah melalui sektor pariwisata, yang diharapkan dapat memberikan andil yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesuai dengan uraian pada latar belakang diatas, maka topik dalam penelitian ini adalah **“ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PARIWISATA PADA BEBERAPA KABUPATEN DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012-2016”**

B. Batasan Masalah

Pembatasan secara spesifik membuat pembahasan dalam penelitian ini akan lebih fokus dan terarah. Sehingga didalam penelitian ini, penulis hanya menganalisis pengaruh jumlah wisatawan, jumlah restoran dan rumah makan, jumlah kamar hotel, jumlah kendaraan bermotor umum, dan PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata pada beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah seberapa optimal dan berpengaruhnya jumlah wisatawan, jumlah restoran dan rumah makan, jumlah kamar hotel, jumlah kendaraan bermotor umum, serta PDRB terhadap pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata, dimana variabel-variabel tersebut merupakan parameter yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh pariwisata terhadap perekonomian daerah melalui PAD yang diperoleh di

wilayah tersebut. PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil laba perusahaan daerah, penerimaan dinas dan pendapatan asli daerah yang sah.

Oleh sebab itu, pertanyaan yang akan diajukan pada penelitian ini adalah:

1. Apakah variabel jumlah wisatawan dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat?
2. Apakah variabel jumlah restoran dan rumah makan dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat?
3. Apakah variabel jumlah kamar hotel dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat?
4. Apakah variabel jumlah kendaraan bermotor umum dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat?
5. Apakah variabel PDRB dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat?

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel jumlah wisatawan terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh variabel jumlah restoran dan rumah makan terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh variabel jumlah kamar hotel terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui pengaruh variabel jumlah kendaraan bermotor umum terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat.
5. Untuk mengetahui pengaruh variabel PDRB terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata pada beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2016.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi masukan terhadap institusi terkait, dimana dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat, dalam mengambil kebijakan-kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan.